



PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA



PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal...

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah.....	Rp.	899.014.652.915,00
b. Belanja Daerah	Rp.	943.792.195.408,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(44.777.542.493,00)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp.	47.777.542.493,00
2. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	44.777.542.493,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
3. Lampiran III.a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran III.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IV.a daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
6. Lampiran IV.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran V.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran V.b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VI.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VI.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VI.c Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran

Belanja...

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 3

Kegiatan/Belanja yang bersifat wajib, mengikat dan kegiatan/belanja yang mendesak dan harus segera dilaksanakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dapat dikategorikan dalam keadaan darurat, yang dananya tidak tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2026 ini, dibebankan pada dana tidak terduga.

Pasal 4

Dalam hal dana tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan/belanja sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2026, dan kegiatan/belanja yang harus dilaksanakan oleh karena ditetapkannya ketentuan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan, dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 3, antara lain sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



SUSLASMARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025 NOMOR



KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.065.750.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	54.345.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	320.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	320.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	320.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.800.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.800.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.800.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	10.000.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	10.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.500.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.500.000.000,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	17.705.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.400.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	1.400.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	16.000.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.000.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	160.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	160.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	120.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	120.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	25.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	25.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.000.000.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	11.000.000.000,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	11.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.000.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	8.000.000.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	8.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.905.750.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.688.000.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	530.000.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	530.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	465.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	465.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	108.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	108.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	585.000.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	100.000.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	485.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	885.000.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	490.000.000,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	240.000.000,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	250.000.000,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	70.000.000,00
4.1.02.02.007.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	70.000.000,00
4.1.02.02.010	Retribusi Penyeberangan di Air	130.000.000,00
4.1.02.02.010.00001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	130.000.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	65.000.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	65.000.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.000.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.000.000,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	332.750.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	332.750.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	332.750.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.200.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.615.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	16.100.000.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	16.100.000.000,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	16.100.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	802.654.822.291,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	767.295.287.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	74.088.140.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	74.088.140.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	74.088.140.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	23.760.735.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	11.111.424.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	7.770.478.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	3.208.132.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	132.814.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	8.549.699.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	1.864.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	54.394.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	8.080.453.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	145.625.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	267.363.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	4.099.612.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	4.099.612.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	490.820.845.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	469.476.260.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	469.476.260.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	21.344.585.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.188.272.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	11.556.313.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	178.625.567.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	178.625.567.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	46.316.360.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	340.000.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	885.000.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	102.756.662.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	30.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.798.184.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.933.590.000,00
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	321.900.000,00
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	183.646.000,00
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.662.249.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.635.357.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.762.619.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.359.535.291,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	35.359.535.291,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.359.535.291,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.473.319.519,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	930.977.960,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.955.237.812,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.294.080.624,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.294.080.624,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.294.080.624,00
4.3.03.02.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.294.080.624,00
4.3.03.02.001.00001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.294.080.624,00
	Jumlah Pendapatan	899.014.652.915,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	791.195.498.269,00
5.1.01	Belanja Pegawai	542.622.506.484,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	388.685.882.900,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	282.595.721.346,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	195.741.100.813,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86.854.620.533,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.425.470.021,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.105.987.217,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.319.482.804,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.542.836.600,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.536.656.600,00
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	6.180.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.087.645.838,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.979.331.850,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	108.313.988,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.787.525.760,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.876.898.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.910.627.760,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.497.991.260,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.703.109.514,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.794.881.746,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.922.585.728,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.697.615.332,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.224.970.396,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.395.306,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.365.586,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.029.720,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.329.959.421,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.285.597.854,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.044.361.567,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	610.799.179,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	395.662.728,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	215.136.451,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.727.165.344,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.093.317.430,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	633.847.914,00
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	150.787.097,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	132.059.549,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	18.727.548,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	137.177.861.161,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	24.353.463.839,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	24.353.463.839,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.095.741.046,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.095.741.046,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	106.728.656.276,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	16.000.000,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	75.000.000,00
5.1.01.02.006.00013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00
5.1.01.02.006.00014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	90.000.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	261.887.536,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	200.000.000,00
5.1.01.02.006.00019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	280.922.740,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	102.756.662.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.798.184.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	30.000.000,00
5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	219.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.858.840.203,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	79.351.800,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	79.351.800,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.773.040,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.773.040,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	69.032.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	69.032.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.869.800,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.869.800,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.548.900,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.548.900,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	45.653.976,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	45.653.976,00
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	10.191,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	10.191,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.548.702.496,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	68.796.696,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.605.800,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	22.500.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.452.800.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.450.400.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.450.400.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	298.322.220,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	142.081.415,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	142.081.415,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.250.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.250.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	117.874.612,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	117.874.612,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.626.608,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.626.608,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.000,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.883.585,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.883.585,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.040.766.432,00
5.1.02.01	Belanja Barang	32.549.935.976,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	32.533.260.976,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.149.500,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	91.463.830,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.386.319.500,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	74.880.000,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	33.502.600,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	392.943.500,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.821.000,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	41.728.900,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	720.428.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	833.656.600,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.710.193.449,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	88.584.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.335.428.960,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	283.014.350,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	81.738.885,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	19.336.900,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	399.727.500,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	972.727.241,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.358.519.564,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.046.441.755,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	562.397.375,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.196.918.600,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	12.427.500,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.376.009.200,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.875.848.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	649.898.267,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	237.090.500,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	37.260.000,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	241.500.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.375.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.740.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	120.750.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	86.480.000,00
5.1.02.01.001.00073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	109.250.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	87.025.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	14.685.500,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.675.000,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	16.675.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	109.885.114.746,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	90.807.799.109,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	210.600.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.344.800.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	295.700.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.800.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	739.200.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	427.600.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	374.400.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.506.400.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.021.232.537,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	550.050.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.997.500,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	593.600.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	601.600.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	75.600.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	16.500.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.000.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.214.800.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	542.000.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.268.200.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.177.456.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.643.600.000,00
5.1.02.02.001.00036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.400.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	9.700.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.601.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	178.457.000,00
5.1.02.02.001.00053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	2.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	122.600.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	360.000.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	73.330.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	17.674.551.072,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	341.500.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.169.000.000,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	97.440.000,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	35.000.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	756.774.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	702.420.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.330.390.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.000.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	993.600.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	8.776.800.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	72.000.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	10.756.800.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	1.123.200.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	4.521.600.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.788.163.529,00
5.1.02.02.002.00002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	7.464.625.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	597.167.200,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.894.500.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.805.696,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	172.180.380,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	255.000.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	173.400.000,00
5.1.02.02.002.00014	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	110.210.940,00
5.1.02.02.002.00016	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	961.550.520,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	9.583.560,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.189.958.700,00
5.1.02.02.002.00020	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	122.989.020,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	495.150.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.002.00022	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	3.507.408,00
5.1.02.02.002.00024	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	30.600.864,00
5.1.02.02.002.00025	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	254.160,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	304.992,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	37.920.672,00
5.1.02.02.002.00028	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	3.863.232,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	15.757.920,00
5.1.02.02.002.00030	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	4.384.260,00
5.1.02.02.002.00032	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	38.251.080,00
5.1.02.02.002.00033	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	317.700,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	317.700,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	47.226.105,00
5.1.02.02.002.00036	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	4.829.040,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	19.506.780,00
5.1.02.02.003	Belanja Sewa Tanah	1.500.000,00
5.1.02.02.003.00001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00
5.1.02.02.003.00021	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	1.500.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.054.497.000,00
5.1.02.02.004.00034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	53.476.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	116.942.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00
5.1.02.02.004.00043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	172.540.000,00
5.1.02.02.004.00355	Belanja Sewa Peralatan Umum	706.539.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	915.725.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00
5.1.02.02.005.00002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	57.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	176.625.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	622.100.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	26.650.000,00
5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	2.650.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.007.00031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	24.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	351.295.800,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	90.000.000,00
5.1.02.02.008.00014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	235.000.000,00
5.1.02.02.008.00028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	26.295.800,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00
5.1.02.02.009.00007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	0,00
5.1.02.02.011.00001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.503.680.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	76.000.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	1.230.000.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.197.680.000,00
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	313.384.308,00
5.1.02.02.015.00002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	313.384.308,00
5.1.02.02.019	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	122.420.000,00
5.1.02.02.019.00001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	122.420.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.227.344.632,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.397.977.132,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	280.720.000,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.321.530.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	455.000.000,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	93.735.132,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	252.000.000,00
5.1.02.03.002.00044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.092.000,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.720.000,00
5.1.02.03.002.00064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	3.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	323.320.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	159.820.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	150.000.000,00
5.1.02.03.002.00404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	85.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	181.040.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	846.012.900,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	746.012.900,00
5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00
5.1.02.03.003.00016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00
5.1.02.03.003.00025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	100.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	933.354.600,00
5.1.02.03.004.00067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00
5.1.02.03.004.00083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	933.354.600,00
5.1.02.03.004.00123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00
5.1.02.03.006.00005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.017.941.470,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.017.941.470,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.375.910.470,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	385.344.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.132.334.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	124.353.000,00
5.1.02.04.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00
5.1.02.04.002.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.363.632.750,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	935.200.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	320.200.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	615.000.000,00
5.1.02.05.001.00004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.428.432.750,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.694.582.750,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	733.850.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.246.796.858,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	27.222.274.858,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	26.281.335.058,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	940.939.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	24.522.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	24.522.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.750.000.000,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.750.000.000,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.750.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.702.895.549,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	800.100.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	800.100.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	800.100.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.278.245.811,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.036.235.811,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.036.235.811,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.092.010.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.092.010.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	641.357.608,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	641.357.608,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	641.357.608,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	9.983.192.130,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	9.983.192.130,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	9.983.192.130,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.829.329.804,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.052.155.440,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.020.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.020.000.000,00
5.1.06.01.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	32.155.440,00
5.1.06.01.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	32.155.440,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	30.000.000,00
5.1.06.03.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	30.000.000,00
5.1.06.03.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	30.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.747.174.364,00
5.1.06.04.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.747.174.364,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.04.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.747.174.364,00
5.2	BELANJA MODAL	26.646.019.639,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.605.202.853,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	69.531.300,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00
5.2.02.01.001.00011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	69.531.300,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	69.531.300,00
5.2.02.01.003.00016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
5.2.02.02.001.00003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00
5.2.02.02.002	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00
5.2.02.02.002.00004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	0,00
5.2.02.03.003.00001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	915.720.725,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	124.994.000,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	75.354.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	49.640.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	790.726.725,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	418.824.250,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	304.502.500,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	67.399.975,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.222.500,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	3.222.500,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.222.500,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00
5.2.02.06.001.00005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00
5.2.02.06.002.00008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	615.472.326,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	615.472.326,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	615.472.326,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00
5.2.02.08.001.00006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00
5.2.02.08.001.00007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00
5.2.02.08.003.00005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.186.175.550,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	1.029.215.550,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	987.215.550,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	42.000.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	156.960.000,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	156.960.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00
5.2.02.15.002	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00
5.2.02.15.002.00006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00
5.2.02.18.001.00001	Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00
5.2.02.18.001.00003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00
5.2.02.19.001.00002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.465.080.452,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.326.122.452,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.326.122.452,00
5.2.02.89.002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	138.958.000,00
5.2.02.89.002.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	138.958.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.893.383.105,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.435.500.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.435.500.000,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	160.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00
5.2.03.01.001.00012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.275.000.000,00
5.2.03.01.001.00016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	457.883.105,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	457.883.105,00
5.2.03.04.001.00003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	119.883.105,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	0,00
5.2.03.04.001.00005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	338.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.135.803.121,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.900.614.473,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	5.926.899.641,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	5.329.940.601,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	150.950.000,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	446.009.040,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	1.973.714.832,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.973.714.832,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	235.188.648,00
5.2.04.02.006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00
5.2.04.02.006.00005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	235.188.648,00
5.2.04.02.007.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	35.188.648,00
5.2.04.02.007.00004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	200.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.011.630.560,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.860.000,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.860.000,00
5.2.05.01.001.00001	Belanja Modal Buku Umum	1.860.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.009.770.560,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.009.770.560,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.768.805.360,00
5.2.05.89.001.00002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	240.965.200,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	123.950.677.500,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.862.537.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.717.250.000,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.717.250.000,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.717.250.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	145.287.500,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	145.287.500,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	145.287.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	121.088.140.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	121.088.140.000,00
5.4.02.05.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	47.000.000.000,00
5.4.02.05.001.00003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	47.000.000.000,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	74.088.140.000,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	74.088.140.000,00
	Jumlah Belanja	943.792.195.408,00
	Total Surplus/(Defisit)	-44.777.542.493,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.777.542.493,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	47.777.542.493,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	34.777.542.493,00
6.1.01.02.002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	34.777.542.493,00
6.1.01.02.002.00001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	34.777.542.493,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	13.000.000.000,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	13.000.000.000,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	13.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	44.777.542.493,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Labuhanbatu Utara, 31 Desember 2025

Bupati
HENDRI YANTO SITORUS